

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

- ❖ **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**
- ❖ **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**
- ❖ **NERACA SKPD**
- ❖ **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**
- ❖ **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NTT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenanan dan pertolongan-Nya maka kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023. Kegiatan-kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

Adapun Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kiranya Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengguna Anggaran,

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19701019 199903 2 004

DAFTAR ISI

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) :
6. Catatan Atas Laporan Keuangan :
 - a. BAB I: Pendahuluan
 - b. BAB II: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah
 - c. BAB III: Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - d. BAB IV: Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan
 - e. BAB V: Penutup
7. Lampiran – lampiran
 - a. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2023
 - b. BKU Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2023
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi PAD antara DKP dan Bidang Akunlap Bulan Desember Tahun 2023
 - d. Daftar Piutang Utang TA 2015 dan TA 2016 serta STS Pelunasan Piutang di Tahun Anggaran 2023
 - e. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap (Hasil Penggabungan) Tahun 2023;
 - f. Daftar Belanja Modal Tahun Anggaran 2023
 - g. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Tahun 2023
 - h. Daftar Aset Tetap (31 Desember 2023)
 - i. Rekapitulasi Setoran Selisih Perjalanan Dinas TLHP_BPK Tahun 2023

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b). Laporan Operasional (LO); (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengguna Anggaran,

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19701019 199903 2 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) UU No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- 4) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 6) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 8) Perda Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Pergub No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
- 10) Pergub No 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
- 11) Pergub No 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1. Pendapatan – LRA

3.1.2. Belanja

3.2. Laporan Operasional

3.2.1. Pendapatan – LO

3.2.2. Beban – LO

3.3. Pos Neraca

3.3.1. Aset Lancar

3.3.2. Aset Tetap

3.3.3. Aset Lain-lain

3.3.4. Kewajiban

3.3.5. Ekuitas

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab IV Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 pada perubahan anggaran direalisasi sebesar **Rp 7.611.509.196,-** dari target penerimaan sebesar **Rp Rp 10.000.000.000,-** atau **76,12 %** dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direalisasi sebesar **Rp 1.812.851.605,-** dari target sebesar **Rp 1.305.225.000,-** atau **138,89%,**
- Retribusi Tempat Khusus Parkir direalisasi **Rp 198.312.000,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 162.000.000,-** atau **122,41%,**
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan direalisasi sebesar **Rp 740.968.531,-** dari target yang ditetapkan dalam perubahan anggaran sebesar **Rp 1.000.000.000,-** atau **74,10%,**
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direalisasi sebesar **Rp 4.859.377.060,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 7.532.775.000,-** atau **64,51%,**

2. Belanja

Anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebagai SKPD sesuai anggaran perubahan tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar **Rp 51.579.537.247,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 21.973.949.847,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp 29.605.587.400,-**. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi sebesar **Rp 46.523.985.726,-** atau **90,20%** dari target sebesar **Rp 51.579.537.247,-** jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp 45.825.823.542,-** mengalami

kenaikan sebesar **Rp 698.162.184,-** atau **1,52 %**. Seluruh belanja langsung dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

terrealisir sebesar **Rp 16.288.835.056,-** atau **82,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 19.628.009.270,-** terdiri dari :

- 01.1.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisir **Rp 1.028.330.059,-** atau **69,27 %** dari target **Rp 1.484.479.325,-**
- 01.1.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisir sebesar **Rp 10.292.462.222,-** atau **83,58 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 12.315.237.500,-**
- 01.1.03. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah direalisir **Rp 11.618.025,-** atau **77,39 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 15.012.825,-**
- 01.1.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisir sebesar **Rp 69.537.400,-** atau **25,26 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 275.240.270,-**
- 01.1.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisir sebesar **Rp 855.000,-** atau **0,40%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 216.249.400,-**
- 01.1.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisir sebesar **Rp 4.702.617.449,-** atau **95,29%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 4.935.245.850,-**
- 01.1.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisir **Rp 183.414.901,-** atau **47,45%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **386.544.100,-**

1.02. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

terrealisir sebesar **Rp 3.140.421.260,-** atau **93,81 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 3.347.563.900,-** yang terdiri dari :

- 02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi direalisir sebesar **Rp 3.140.421.260,-** atau **93,91%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 3.344.163.900,-**

02.1.02. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi tidak terrealisasikan sehingga realisasi **Rp 0,-** atau **0%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 3.400.000,-**

1.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap direalisasi sebesar **Rp 23.230.152.800,-** atau **95,46 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 24.335.071.000,-** terdiri dari :

03.1.01. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil direalisasi sebesar **Rp 98.515.400,-** atau **48,73 %** dari target sebesar **Rp 202.151.000,-**

03.1.03. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT direalisasi sebesar **Rp 3.602.400,-** atau **33,08%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 10.890.000,-**

03.1.05. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi direalisasi sebesar **Rp 2.000.000,-** atau **38,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 5.130.000,-**

03.1.06. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi direalisasi sebesar **Rp 23.126.034.000,-** atau **95,89%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 24.116.900.000,-**

1.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya direalisasi sebesar **Rp 1.665.646.350,-** atau **90,91%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 1.832.158.119,-** terdiri dari :

04.1.01. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi tidak terrealisasikan sehingga realisasi sebesar **Rp 0,-** atau **0%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 5.130.069,-**

04.1.05. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut direalisasi sebesar **Rp 1.665.646.350,-** atau **91,17%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 1.827.028.050,-**

1.05. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan direalisasikan sebesar **Rp 2.138.930.260,-** atau **92,40 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 2.314.896.800,-** terdiri dari :

06.1.01. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil direalisasikan sebesar **Rp 2.138.930.260,-** atau **92,40%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 2.314.896.800,-**

1.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan direalisasikan sebesar **Rp 60.000.000,-** atau **49,25 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 121.838.158,-** terdiri dari :

06.1.02. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar direalisasikan sebesar **Rp 60.000.000,-** atau **49,25 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp 121.838.158,-**

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan (*khusus PAD yang dikelola oleh SKPD*) direalisasi sebesar **Rp 7.611.509.196,-** atau **76,12%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 10.000.000.000,-** pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja

Rencana Belanja untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sesuai perubahan APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp 51.579.537.247,-** dan terealisasi sebesar **Rp 47.152.417.645,-** atau **91,42 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar **Rp 45.825.823.542,-** maka mengalami kenaikan sebesar **Rp 1.326.594.103,-**. Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai terealisasi sebesar **Rp 11.143.584.106,-** atau **88,90%** dari target sebesar **Rp 12.535.190.000,-**. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar **Rp 7.622.644.379,-** atau **80,76 %** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 9.438.759.847,-**

b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar **Rp 28.386.189.160,-** atau **95,88 %** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 29.605.587.400,-**.

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terealisasi sebesar **Rp 3.759.139.160,-** atau **92,65 %** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 4.057.487.400,-**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terealisasi sebesar ***Rp 19.957.050.000,-*** atau ***97,81 %*** dari target yang ditetapkan sebesar ***Rp 20.403.000.000,-***
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, terealisasi sebesar ***Rp. 4.670.000.000,-*** atau ***90.77 %*** dari target yang ditetapkan sebesar ***Rp 5.145.100.000,-***

3.2. Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan – LO

Kelompok pendapatan daerah – LO yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisasi sebesar ***Rp. 8.868.080.040,60,-*** dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO, pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar ***Rp 3.079.968.299,60,-*** atau ***100 %***
2. Retribusi tempat khusus parkir LO, pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi ***Rp 184.812.000,-*** atau ***100%***
3. Retribusi pelayanan kepelabuhan LO, pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi ***Rp 740.228.531,-*** atau ***100 %***
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah LO, pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi ***Rp 4.863.071.210,-*** atau ***100%***

2. Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar, Beban LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai – LO merupakan, beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar ***Rp 11.143.584.106,-*** atau ***100%***
2. Beban barang dan jasa – LO merupakan, beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar ***Rp 9.251.659.791,18,-*** atau ***100%***

3. Beban penyusutan dan amortisasi – LO merupakan, beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp 4.052.686.878,54,-** atau **100 %**
4. Surplus/Defisit dari operasi (**Rp 15.578.231.985,12,-**) atau **100 %**.

3.3. Neraca

Pos-pos Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai aset, kewajiban dan equitas. Neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT pada TA 2023 terdiri dari neraca komparatif yang merupakan perbandingan komponen neraca Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Total aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 189.540.433.379,72,-** yang terdiri dari Aset lancar sebesar **Rp 3.888.249.901,67,-** Aset tetap dengan nilai sebesar **Rp. 183.592.218.978,05,-** dan Aset lainnya sebesar **Rp 2.059.964.500,-**

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah uang tunai atau kas kekayaan lain yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku.

Saldo awal aset lancar 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp 1.873.437.078.85,-** sedangkan saldo akhir s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 3.888.249.901,67,-**. Rincian lengkap aset lancar sebagai berikut :

1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 0 ,-** adalah sisa kas pada rekening giro bendahara yang belum disetor kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023

1.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 3.742.559.485,-** merupakan piutang penjualan udang dan sewa sewa lahan dan bangunan di Tenau dan Oeba serta piutang lain-

lain. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (**Rp 100.350.000,-**) adalah sisa tagihan piutang utang tahun anggaran 2015 sebesar **Rp 89.220.000-** dan sisa tagihan piutang utang tahun anggaran 2016 sebesar **Rp 11.130.000,-** yang sudah diselesaikan pada tahun neraca sebesar **Rp 3.850.000,-**

1.3 Piutang lain-lain PAD yang sah

Piutang lain – lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.618.750,-** Angka ini merupakan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan dan bangunan.

1.4 Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 173.541.666,67,-** merupakan perhitungan masa kontrak sewa rumah dinas dan kantor untuk Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 70.880.000,-** diperoleh dari sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Coolbox Berinsulasi sebanyak 8 (delapan) Unit hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2022 senilai **Rp 70.880.000,-**.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo awal aset tetap 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp 158.302.643.789,78,-** sedangkan saldo akhir s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 183.592.218.978.05,-**. Nilai tersebut diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 158.302.643.789,78,-** ditambah dengan mutasi bertambah berupa perolehan aset tetap tahun 2023 sebesar **Rp 46.505.689.160,-** dan reklas sebesar **Rp 18.119.500.000,-** dikurangi mutasi kurang berupa reklas sebesar **Rp 18.119.500.000,-**, koreksi penghapusan sebesar **Rp 3.525.000,-** dan kapitalisasi belanja sebesar

Rp 74.593.180,- serta dikurangi nilai penyusutan tahun 2023 sebesar **(Rp 1.205.688.420,14,-)**.

Rincian lengkap aset tetap sebagai berikut :

2.1 Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 86.652.207.019,31,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 86.652.207.019,31,-** tidak ada perubahan pada nilai aset tetap tanah dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap tanah tahun 2023 sebesar **Rp 86.652.207.019,31,-**
- Saldo akhir nilai buku aset tetap tanah tahun 2023 sebesar **Rp 86.652.207.019,31,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

2.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 32.578.658.708,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 28.698.137.728,-** sehingga mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar **Rp 3.880.520.980,-** dengan rincian nilai buku aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar **Rp 28.698.137.728,-**
- Belanja modal tahun 2023 senilai **Rp 3.759.199.160,-**
- Mutasi bertambah (reklas) sebesar **Rp 195.500.000,-**
- Akumulasi Penyusutan sebesar **(Rp 0 -)**
- Mutasi berkurang (penghapusan) sebesar **(Rp 3.525.000,-)**
- Saldo akhir nilai buku aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar **Rp 32.578.658.708,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

2.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 57.126.540.151,04,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 55.147.240.151,04,-** mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar

Rp 1.979.300.000,- dengan rincian nilai buku aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku gedung dan bangunan senilai **Rp 55.147.240.151,04,-**
- Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai **Rp 57.579.867.362,97,-**
- Akumulasi Penyusutan sebesar (**Rp 0,-**)
- Mutasi berkurang (rekas) sebesar (**Rp 18.119.500.000,-**)
- Saldo akhir nilai buku gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar **Rp 57.126.540.151,04,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

2.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 39.659.694.688,67,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 17.156.902.022,-** mengalami kenaikan **Rp 22.502.792.666,67,-** dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut:

- Saldo awal nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp 17.156.902.022,-**
- Mutasi bertambah (rekas) sebesar **Rp 17.924.000.000,-**
- Akumulasi Penyusutan sebesar (**Rp 0,-**)
- Saldo akhir nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar **Rp 39.659.694.688,67,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*).

2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar **Rp 452.743.500,-** diperoleh dari saldo awal yang merupakan saldo akhir 2022 sebesar **Rp 456.743.500,-** mengalami perubahan tahun 2023 dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap lainnya **Rp 452.743.500,-**
- Belanja Aset tetap lainnya tahun 2023 senilai **Rp 0,-**
- Mutasi bertambah/ berkurang (rekas antar belanja) (**Rp 0,-**)

- Akumulasi Penyusutan sebesar (**Rp 0,-**)
- Saldo akhir nilai buku aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar **Rp 452.743.500,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 301.570.000,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp 301.570.000,-** tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan rincian nilai buku aset sebagai berikut :

- Saldo awal nilai buku aset tetap konstruksi dalam pengerjaan senilai **Rp 301.570.000,-**
- Mutasi bertambah/berkurang (rekas) sebesar **Rp 0,-**
- Saldo akhir nilai buku aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 sebesar **Rp 301.570.000,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah nilai aset tidak berwujud dan nilai aset tetap yang direklas atau dialihkan pencatatannya ke aset lainnya dikarenakan aset tetap tersebut dikategorikan telah mengalami rusak berat. Nilai harga perolehan aset lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp 2.059.964.500,-** terdiri dari Aset Aset tidak berwujud (ATB) senilai **Rp 59.950.000,-** Aset lain-lain sebesar **Rp 2.047.974.500,-** (*daftar rincian lengkap, terlampir*)

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar **Rp. 296.025.200,-** merupakan perhitungan masa kontrak sewa lahan dan bangunan di PPP Tenau dan PPI Oeba yang lebih dari 1 (satu) Tahun tetapi besaran retribusinya telah disetor ke Kas Daerah.

5. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT setelah dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 189.244.408.179,32,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Ekuitas awal sebesar ***Rp 162.284.005.368.63,-***
- Ditambah RK PPKD sebesar ***Rp 39.540.908.449,-***
- Dikurangi Surplus/Defisit – LO (***Rp 15.578.231.98,51,-***)
- Dikurangi dampak perubahan aset tetap (***Rp 219.457.333,33,-***)
- Dikurangi dampak perubahan atas kapitalisasi (***Rp 74.593.180,-***)
- Ditambah dampak perubahan atas penyisihan ***Rp 3.850.000,-***
- Ditambah dampak perubahan atas piutang ***Rp. 2.085.763.360,-***
- Jumlah ekuitas akhir ***Rp 189.244.408.179,32,-***

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar ***Rp 162.284.005.368.63,-***

Ditambah RK PPKD sebesar ***Rp 39.540.908.449,-***

Dikurangi Surplus/Defisit – LO (***Rp 15.578.231.98,51,-***)

Dikurangi dampak perubahan aset tetap (***Rp 219.457.333,33,-***)

Dikurangi dampak perubahan atas kapitalisasi (***Rp 74.593.180,-***)

Ditambah dampak perubahan atas penyisihan ***Rp 3.850.000,-***

Ditambah dampak perubahan atas piutang ***Rp. 2.085.763.360,-***

Jumlah ekuitas akhir ***Rp 189.244.408.179,32,-***

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Profil SKPD

1. Visi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018-2023. Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu: **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi RPJMD 2018-2023 maka Dinas Kelautan dan Perikanan akan berkontribusi secara lebih spesifik untuk mencapai misi:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; yang bermakna melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung misi ini dengan memberikan bantuan/hibah pada masyarakat perikanan berupa sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan sejalan dengan arahan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang menjadi salah satu sektor penting dalam mensukseskan **Program NTT Bangkit** dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata sebagai penggerak utama;

2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). Wilayah perairan Provinsi NTT yang luas, memiliki keanekaragaman spesies yang langka serta ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun yang luas dengan ditunjang hamparan pasir putih yang indah merupakan elemen potensial dalam pengembangan pariwisata bahari. Optimalisasi pemanfaatannya dalam konteks pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) kemajuan ekonomi NTT.

4.2. Realisasi Pendapatan Tidak Mencapai Target

Pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT direalisir **Rp 7.611.509.196** atau **76,12%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 10.000.000.000,-** pada tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direalisir sebesar **Rp 1.812.851.605,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 1.305.225.000,-** atau **138,89%**,
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir direalisir sebesar **Rp 198.312.000,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 162.000.000,-** atau **122,41%**,
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan direalisir sebesar **Rp 740.968.531,-** dari target yang ditetapkan dalam perubahan anggaran sebesar **Rp 1.000.000.000,-** atau **74,10%**,
4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direalisir sebesar **Rp 4.859.377.060,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 7.532.775.000,-** atau **64,51%**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2022 sebesar **Rp 7.558.166.732,05,-** maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp 53.342.463,95,-** atau sebesar **36,17 %**.

4.3. Belanja Tidak Terserap

Anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebagai SKPD sesuai anggaran perubahan tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar ***Rp 51.579.537.247,-*** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar ***Rp 21.973.949.847,-*** dan Belanja modal sebesar ***Rp 29.605.587.400,-***. Sampai dengan tanggal 31 desember 2023, terealisasi sebesar ***Rp 47.152.417.645,-*** atau ***91,42%*** dari target yang ditetapkan yakni belanja operasi sebesar ***Rp 21.973.949.8471,-*** dan belanja modal sebesar ***Rp 29.605.587.400,-***. Anggaran tidak terserap sebesar ***Rp 5.055.551.521,-*** atau ***8,58%*** dari anggaran yang tersedia disebabkan oleh unsur penghematan dari beberapa kegiatan yaitu belanja modal, perjalanan dinas dan belanja lainnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) atas melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengguna Anggaran,

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19701019 199903 2 004